

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut untuk diperhatikan sampah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Volume peningkatan sampah sebanding dengan meningkatnya tingkat konsumsi manusia. Setiap aktivitas manusia secara pribadi maupun kelompok, di rumah, kantor dan pasar atau dimanapun pasti akan menghasilkan sampah organik maupun sampah anorganik. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 1 tentang sampah disebutkan bahwa sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Sampah di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan juga menjadi masalah social, ekonomi dan budaya. Dan hampir di semua kota di Indonesia mengalami kendala dalam mengolah sampah. Hal ini terjadi karena

tidak meratanya tempat pembuangan sampah khusus, yang sering kita sebut. TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan TPA (tempat Pembuangan Akhir) disebuah kota atau desa karena kurangnya lahan atau belum difasilitasi tempat khusus sehingga masyarakat banyak membuang sampah di sungai. Bukan hanya sungai akibat kurangnya TPA atau belum adanya TPS dan TPA mengakibatkan masyarakat sampah keselokan, kali, dan dilautan. Sehingga kebersihan semakin rusak.

Menurut data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa Indonesia memproduksi sampah hingga 65 Juta ton pada tahun 2016 lalu. Dan jumlah sekarang naik 1 juta ton dari sebelumnya. Berdasarkan laporan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan mengatakan sampah yang mencapai sekitar 60 persen dan sampah plastic mencapai 15 persen dari timbunan sampah. (Kompasiana, 2019). Sampah merupakan musuh bagi lingkungan karena mampu menimbulkan dan mencemari lingkungan. Lingkungan yang tercemar oleh pembuangan sampah akhirnya kotor, kumuh, jorok dan bau kemudian akan menimbulkan penyakit. Itu salah satu permasalahan lingkungan hidup yang seringkali menjadi sorotan masyarakat saat ini.

Pengelolaan sampah Kabupaten Kuningan yang dikelola oleh Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaanya yaitu Dinas Lingkungan Hidup di bagian Bidang Kebersihan dan Pertamanan. yang dijelaskan dalam

Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Pasal 15 ayat 1 Nomor 53 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian tugas dan tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan. Menjelaskan bahwa bidang kebersihan dan pertamanan di Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas pengelolaan kebersihan dan pertamanan termasuk didalamnya pengelolaan persampahan. Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebersihan di Kabupaten Kuningan.

Luas 1.195,71 Km atau 3,38 % dari luas provinsi jawa barat, yang terbagi dalam 32 Kecamatan dan 376 desa atau Kelurahan. Dengan jumlah penduduk berjumlah 1.149.655 jiwa. Di kabupaten kuningan khususnya di Desa Cipancur Kecamatan kalimanggis Kabupaten Kuningan tumpukkan sampah menimbulkan masalah, selain mengganggu lingkungan dan lingkungan juga mengganggu kenyamanan bagi warga masyarakat. Semakin hari sampah semakin berserakan karena tidak adanya pembuangan sampah khusus atau pengangkutan sampah di desa Cipancur.

Pemerintahan Kabupaten Kuningan menerapkan peraturan Daerah No 04 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah, pasal 11 tentang pengelolaan sampah meliputi :

(1) Pengelolaan sampah meliputi :

a. Pengurangan Sampah

b. Penanganan Sampah

(2) Penyelenggara Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Dan tercantum pada pasal 16 ayat 3 menjelaskan Daerah wajib menyediakan dan/atau membangun TPST.

Walaupun telah ditetapkan Peraturan Daerah No 04 Tahun 2010 dalam kenyataannya tidak sejalan dengan apa yang diharapkan karena masih banyak sampah di Kabupaten Kuningan yang tidak diperhatikan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi *Leading Sector*. adapun Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan yaitu :

1. Penyediaan sarana prasarana kebersihan
2. Pemasangan pagar Ram Kawat jembatan
3. Penataan tempat pembuangan sampah akhir (TPA)
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam gerakan K3
5. Sosialisasi Kebijakan pengelolaan sampah
6. Pembentukan bank sampah

Keberadaan sampah yang menumpuk di kali dan lingkungan karena tidak adanya tempat pembuangan sampah dikarenakan terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah dan kurang tersebarnya Informasi yang melalui sosialisasi mengenai pengelolaan sampah, khususnya di Desa Cipancur

Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan tentunya mengakibatkan tidak nyamannya bagi masyarakat sekitarnya. Keterbatasan lahan TPA serta tidak adanya sarana prasarananya pembuangan sampah dan tidak adanya pengangkutan sampah khusus untuk di Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan.

Melihat permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang masalah di atas dapat dibuat rumusan masalah yang merupakan *problem statement* (pernyataan masalah) sebagai berikut “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan belum optimal”

1.3. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan.
2. Hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah yang ada di Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan.
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengacu pada rumusan penelitian, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan.

3. Untuk mengetahui upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

1.5.1. Kegunaan Teoritis

1. Mengembangkan ilmu, menambah pengetahuan dan wawasan untuk memahami kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan.
2. Menambah wawasan pengetahuan ilmu sosial terapan pada ilmu Administrasi Negara mengenai studi implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis kabupaten Kuningan.
3. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat dilakukan sebagai bahan kajian yang bisa dijadikan acuan untuk tata aturan bagi tugas yang berwenang dalam pengelolaan sampah di Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan dan juga bagi masyarakat secara umum supaya ikut serta dalam penanggulangan sampah.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Kegunaan secara umum yaitu untuk memberikan bahan evaluasi yang dapat dijadikan acuan lembaga atau instansi yang berkait dalam mengimplementasikan tentang kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan.
2. Sebagai bahan acuan bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan publik harus diimplementasikan supaya mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai actor, organisasi, prosedur dan Teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks dan dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai dampak (*outcome*).

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan penting, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif sebagai memecahkan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrative maupun agen-agen pemerintahan. Kebijakan yang dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi kebijakan mendapatkan dukungan pelaksana, namun beberapa yang lain akan ditentang oleh pelaksana.

Ripley dan Franklin (*Dalam Winarno 2014:148*) mendefinisikan Implementasi sebagai:

“Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefite*), atau suatu jenis keluaran yang (*Tangible output*)”

Carl Fried Rich (*dalam Winarno 2014:20*) mendefinisikan Kebijakan sebagai

:

“kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (*dalam Winarno 2014:149*)

mendefinisikan Implementasi Kebijakan bahwa :

“Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan yang sebelumnya”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas, kegiatan atau program, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Kebijakan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dalam proses dan pencapaian tujuan hasil (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang akan dicapai.

Berkait dengan teori-teori implementasi yang telah diuraikan diatas, penulis menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh George Charles Edwards III (*dalam anggara 2014:249*) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan diartikan sebagai :

“tahap dalam kebijaksanaan yang berada diantara tahapanpenyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (*Output, Outcome*), aktivitas implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi dan lain-lain”.

Dalam model yang dikembangkannya, ia mengemukakan Empat variable yang krusial dalam implementasi kebijakan dan yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi. Keempat variable tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi. Keseluruhan variable saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

a. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran atau fungsi yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Komunikasi menurut Edwerds III, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Mengetahui atas apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personal yang tepat, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat dan konsisten, komunikasi atau pentransmisian informasi diperlukan supaya para pembuat keputusan dan implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan

diterapkan dalam masyarakat . indicator yang dapat dipakai atau digunakan untuk mengukur keberhasilan komunikasi yaitu tranmisi, kejelasan dan konsisten.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwerds III, yaitu sebagai berikut :

1. *Staf*, adalah sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Dalam jumlah sesuai kebutuhannya dan dalam kemampuan sesuai dengan yang diminatinya.
2. *Informasi*, sumber penting yang kedua bagi implementasi kebijakan, yaitu berkait dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. *Kewenangan*, Sumber lain yang penting dalam implementasi kebijakan. Artinya kewenangan yang dibutuhkan bagi implementator yang sangat bervariasi tergantung pada kebijakan yang akan dilaksanakan.
4. *Fasilitas*, Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan dan jika tanpa fasilitas fisik yang memadai, maka implementasi tidak akan berjalan dengan baik dan efektif. Fasilitas ini berguna tergantung kebutuhan kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada Tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melakukan kebijakan, antara lain :

1. *Pengangkatan Birokrasi*, hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan, ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
2. *Instesitas Respons atau Tanggapan Pelaksana*.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi Edwerds III merupakan mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan, ia menekankan perlu adanya *Standar Operasional Procedure (SOP)* yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu instansi, ia juga mengingatkan bahwa adakalanya fregmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak instansi untuk mencapai tujuannya

1.6.2. Pengelolaan Sampah

1.6.2.1. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir yang secara garis besar kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer, pengolahan dan pembuangan akhir (Sejati, 2009:24)

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu : pengumpulan pengangkutan dan pembuanganakhir. Secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ketempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan menggunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti

sampah, gerobak dorong maupun tempat pembangunan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah periode waktu tertentu.

Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ketempat pembuangan akhir atau pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir. Pada tahap pembuangan akhir atau pengolahan sampah akan mengalami pemrosesan yang baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

Pengelolaan sampah terutama di Desa sangat kompleks lebih tepatnya sampah rumah tangga. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tinggi laju timbulnya sampah yang tinggi.

1.6.2.2. Sampah

Sampah adalah suatu benda yang tidak digunakan atau dikehendaki dan harus dibuang yang dihasilkan dari kegiatan manusia (Manik 2009:67). Permasalahan lingkungan saat ini ada diberbagai tempat. Permasalahan ini menyangkut pencemaran, baik pencemaran air, tanah, udara dan suara. Pencemaran tersebut

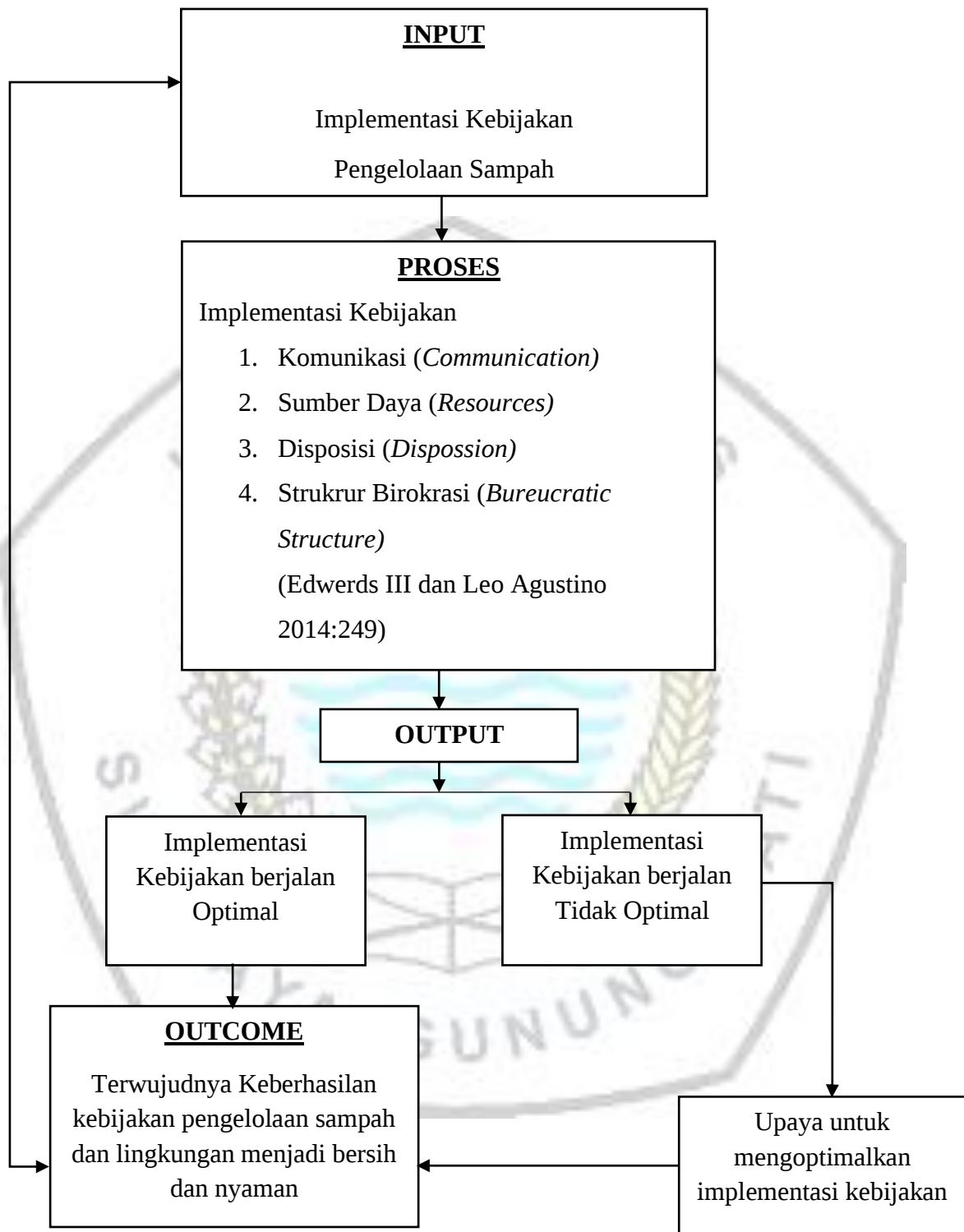
diakibatkan oleh aktivitas manusia.pencemaran tanah misalnya banyak sampah yang tertimbun, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat.

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena sudah diambil bagian utamanya atau karena pengolahan atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonmis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.

Sampah adalah bahan yang dibuang atau terbuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonominya. Sampah merupakan limbah padat dan juga setengah padat dari bahan organik atau anorganik, baik benda logam maupun benda benda bukan logam yang dapat dibakar dan tidak dapat dibakar.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sampah sesuatu yang tidak berguna lagi dan dibuang oleh pemiliknya yang sudah tidak bermanfaat bagi-nya itu sendiri.

F
E
E
D
B
A
C
K



Gambar 1.1
Pola Kerangka Pemikiran

1.7. Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1. Definisi Konsep Penelitian

- a. Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*Benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*Tangible Output*).
(Ripley dan Franklin dalam Winarno, 2014:148)
- b. Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (Winarno, 2014:39)
- c. Pengelolaan Sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir yang secara garis besar kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbunan sampah, pengumpulan sampah, transfer, pengolahan dan pembuangan akhir (Sejati, 2009:24)
- d. Sampah adalah suatu benda yang tidak digunakan atau dikehendaki dan harus dibuang yang dihasilkan dari kegiatan manusia (Manik 2009:67)

1.7.2. Operasionalisasi Konsep Penelitian

Tabel 1.1
Operasional Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan menurut George C. Edwards III (dalam Anggara, 2014:249)	Komunikasi (<i>Communication</i>)	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	Sumber Daya (<i>Resources</i>)	1. Staf 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	Disposisi (<i>Disposition</i>)	1. Pengangkatan Birokrasi 2. Intensif
	Struktur Birokrasi (<i>Bureaucratic</i>)	1. <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) 2. Fragmentasi

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu : cara ilmiah, data, tujuan dan kegiatan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yang rasional, empiris dan sistematis.

Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.

Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif menurut Sharan B. and Merriam (2007) dalam buku *Qualitative Research; A Guide to Design and Implementation* (dinyatakan dalam buku Sugiyono 2016:348) adalah merupakan pendekatan yang berfungsi untuk menemukan dan memahami fenomena sentral.

Menurut Bogdan dan Taylor (Dalam Moleong 2004 : 24) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pendapat lain menurut Jahe Richie (dalam Moleong 2013:6) menjelaskan tentang penelitian kualitatif yaitu upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena penelitian yang dilakukan bukan untuk mencari hubungan antar variable, akan tetapi penelitian dilakukan untuk menggali, menemukan, menjelaskan dan memaparkan tentang “Implementasi Kebijakan Dinas Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis Kabupaten Kuningan”.

1.8.2. Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Sempel atau informan yang dilibatkan merupakan orang-orang yang dapat diberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik pemilihan informan yaitu dengan cara *Purposive Sampling* artinya pengambilan sampel atau informan dipilih sesuai dengan kebutuhan.

Informan-informan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Informan Kunci, Yaitu :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup
 3. Kepala Seksi Kebersihan
- b. Informan Pendukung
1. Kepala Desa Cipancur
 2. Masyarakat Desa Cipancur

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Sugiyono (2016:377)

“Dalam penelitian Kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (Kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), Wawancara mendalam (*in depth interview*) dan Dokumentasi”

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menurut (Sugiyono, 2016:376-377) meliputi :

1. Study Pustaka
Yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara literatur, buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti untuk diperlukan penulis sebagai bahan referensi dan acuan penelitian.
2. Study lapangan
Studi lapangan dilakukan dua Teknik yaitu :
 - a. Observasi , yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung dilokasi peneliti.

- b. Wawancara (sugiyono 2014, 384) yaitu suatu Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan *Key Information* (Informasi Kunci).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (pasolong, 2013:70)

1. Data primer yakni menggunakan metode wawancara kepada informan yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada yang berkepentingan.
2. Data sekunder, dilakukan dengan cara mencari data-data yang tersedia yang diperlukan oleh penulis sebagai referensi dan bahan acuan penelitian. Seperti bahan-bahan referensi, study kepustakaan, melalui literature-literature yang dibutuhkan penulis.
3. Dokumentasi, dengan mengambil dokumen dengan bentuk tulisan, seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan dan dokumen dalam bentuk gambar/foto yang relevan dengan masalah yang diteliti.

1.8.4. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Uji Keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validasi dan reabilitas. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data sesungguhnya. Terjadi pada objek penelitian. Dalam hal ini reabilitas berkenaan dengan derajat konsisten dan stabilitas data atau temuan (Sugiyono, 2017:267)

Sugiyono (2017:270) menyatakan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi : “*credibility* (validitas internal), *transferability*

(validitas eksternal), *dependability* (reability) dan *confirmability* (objektifitas)”

Penulis melakukan keabsahan data dengan melakukan Teknik triangulasi. Wiersma dalam sugiyono (2017:273), menyatakan bahwa *“Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures”*.

Triangulasi dalam menguji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber-sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi Teknik pengumpulan data dan waktu.

Alasan penulis melakukan Teknik triangulasi adalah dengan Teknik ini dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu study sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

Adapun cara yang digunakan dalam triangulasi ini adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan lapangan dan hasil wawancara dengan para informan.

2. Membandingkan apa yang dilakukan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.

Pengecekan data dilakukan memastikan bahwa data yang diperoleh adalah akurat dan valid, maka dilakukan validitas data dengan Teknik triangulasi yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada informan yang berbeda terhadap data maupun informan dari hasil wawancara. Data dapat dikatakan valid apabila terdapat konsistensi atau kesesuaian antara informasi yang diberikan oleh informan satu dengan informan lainnya.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung, kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan yang dapat mendukung penelitian. Jadi peneliti ini menggunakan bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Cipancur.

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016:404-405) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga

datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Jika didalam penelitian kualitatif menyajikan data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Lalu disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

3. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah ke tiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh data-data yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulannya yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

1.9. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan sebagai pelaksana Pemerintah Daerah yang beralamat Jl.RE. Martadinata, No.256, Ancaran, ancaran, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45513. Telp. (0232) 874655. Alasan memilih ini :

1. Adanya permasalahan yang perlu diteliti
2. Adanya data yang mendukung
3. Lokasi penelitian yang terjangkau

1.9.2. Jadwal Penelitian

Penulis melakukan penelitian selama 4 bulan, sampai terselesaikannya hasil penelitian ini terhitung dari bulan April 2020 sampai Juli 2020.

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

[illegible]